ANALISIS EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN ASET TETAP DAN PENERAPANNYA TERHADAP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA-BMD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Dari Syarat – Syarat Guna

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Diajukan Oleh:

RIZKI UTAMI

NPM 17.01.12.0501.P

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIDINANTI

PALEMBANG 2020

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Rizki Utami
Nomor Pokok	:	17.01.12.0501. P
Program Studi	:	Akuntansi
Jenjang Pendidikan	:	Strata I
Mata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal	:	Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Pembimbing Skripsi

Tanggal 12 - 09 - 20 Pembimbing I : _____

Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN : 0205056701

Tanggal 12 - 09 - 20 Pembimbing II : _____

Febransyah, S.E., M.M
NIDN : 0203026601

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

158 / PS / DFE / 2020

_____

Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak. CA. CSRS
NIDN : 0205026401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

"Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah." *(HR. Ibnu Hibban)*

Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat-Nya, sampai semut di sarangnya, dan ikan di lautan bershalawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." *(HR. Thabrani)*

"Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan,

Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya"

(Q.S. An-Najm ayat 39-40)

…Dan katakanlah, "Ya Allah, tambahkanlah Ilmu kepadaku."

(Q.S Toha;114)

Ku persembahkan kepada :

- Allah Subhanahu Wa Ta'ala
- Ibunda dan Alm. Ayahanda
- Dosen Pembimbing dan Dosen Pengajar
- Teman Kantor dan Teman Seperjuangan
- Almamaterku

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Utami

Nomor Pokok : 17.01.12.0501.P

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA-BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin" telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 28 September 2020

Penulis

METERAI TEMPEL

6000

Rizki Utami

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) Pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin"** guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun teori. Hal ini disebabkan keterbatasan literatur dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat, pemikiran, serta doa dalam penulisan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Yth. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, M.P. selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA. CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan bimbingan, dan pengarahan selama masa studi.
3. Yth. Ibu Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan pengarahan selama masa studi.
4. Yth. Febransyah, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan bimbingan, motivasi dan mendidik penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar, dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan,

dan memberikan informasi dalam melaksanakan proses penyelesaian skripsi ini,

6. Yth. Bapak Kepala Badan, dan seluruh staf bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin yang telah memberikan akses secara terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua, Alm Ayahanda dan Ibu kandung penulis tercinta, wanita terhebat di dunia, yang sudah merawat dan membesarkan penulis selama ini. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, kesabaran dalam mendidik dan memberikan dukungan serta tak pernah berhenti mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak - pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dalam memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Palembang, September 2020
Penulis

Rizki Utami

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK xii
RIWAYAT PENULIS xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Manfaat Penelitian 4

1.4.1 Manfaat Akademik 4

1.4.2 Manfaat Praktis..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1 Kajian Teoritis 6

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sek. Publik 6

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik 6

2.1.1.2 Organisasi Sektor Publik 8

2.1.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 11

2.1.2 Sejarah & Perkembangan Akuntansi Sektor Publik 13

2.1.2.1 Sejarah Akuntansi Sektor Publik 13

2.1.2.2 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik 14

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Sektor Publik 16

2.1.4 Karateristik Akuntansi Sektor Publik 16
2.1.5 Teori Stewardship 18
2.1.6 Teori Barang Publik 18
2.1.7 Pengertian Efektivitas 18
2.1.8 Pengertian Penatausahaan 19
2.1.8.1 Ruang Lingkup Penatausahaan 19
2.1.9 Pengertian Aset Tetap 19
2.1.10 Penatausahaan Aset atau Barang Milik Daerah 22
2.1.10.1 Pembukuan 23
2.1.10.2 Inventarisasi..... 23
2.1.10.3 Pelaporan 24
2.1.11 Penyajian dan Pengungkapan 24
2.1.12 Barang Milik Daerah 25
2.1.13 Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMD 27
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan..... 28
2.3 Kerangka Berfikir..... 31

BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 33
3.1.1 Tempat Penelitian 33
3.1.2 Waktu Penelitian 33
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 33
3.2.1 Sumber Data 33
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 34
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling 34
3.3.1 Populasi 34
3.3.2 Sampel 35
3.3.3 Sampling 35
3.4 Rancangan Penelitian ..... 35 3.5 Variabel & Definisi Operasional 36

3.6 Instrumen Penelitian 37
3.7 Teknik Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
4.1 Hasil Penelitian 38
4.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Kab. MUBA 38
4.1.2 Visi dan Misi BPKAD Kab. MUBA 39
4.1.2.1 Visi BPKAD Kab. MUBA 39
4.1.2.2 Misi BPKAD Kab. MUBA 40
4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 41
4.1.3.1 Struktur Organisasi BPKAD Kab. MUBA 42
4.1.3.2 Uraian Tugas BPKAD Kab. MUBA 43
4.1.4 Penatausahaan Aset Tetap BPKAD Kab. MUBA 58
4.1.5 Inventarisasi Atas Penatausahaan BMD 60
4.1.6 Penatausahaan BMD PP No.71 Tahun 2010 62
4.1.7 Pengelolaan Simda BMD 64
4.2 Pembahasan 67
4.2.1 Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap 67
4.3 Kendala Dalam Penatausahaan Aset Tetap 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 84
5.1 Kesimpulan 84
5.2 Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Organisasi Sektor Publik 9

Tabel 2.2 Peneliti Yang Relevan 30

Tabel 4.1 Daftar BMD Tanah, gedung dan Bangunan 61

Tabel 4.2 Perbandingan Permendagri No.19 Dengan Penatausahaan BMD ... 61

Tabel 4.3 PerbandinganTanah Bersertifikat Dengan Yang Belum..... 62

Tabel 4.4 Perbandingan PP No.71 Dengan Penatausahaan BMD 63

Tabel 4.5 Perbandingan Perbup No.41 Dengan Pengelolaan SIMDA BMD ... 66

Tabel 4.6 Evaluasi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan 75

Tabel 4.7 Analisis Aspek Evaluasi 79

Tabel 4.8 Evaluasi Kelengkapan Dokumen isi KIB 81

Tabel 4.9 Evaluasi Penerapan Aset Tetap Terhadap Simda BMD 82

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 32

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 42

ABSTRAK

RIZKI UTAMI, Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin (dibawah bimbingan Ibu Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Febransyah, S.E., M.M)

Perumusan masalah dalam penelitian ini : bagaimana efektivitas penatausahaan aset tetap dan penerapannya terhadap sistem informasi manajemen daerah (Simda BMD) pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.
Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penatausahaan aset tetap dan penerapannya terhadap sistem informasi manajemen daerah (Simda BMD) pada BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan atau penatausahaan, inventarisasi dan pengelolaan atau pelaporan aset/barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset tetap yang digunakan dalam penelitan ini yaitu berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, yang mana media yang digunakan untuk mencatat aset atau penginputan aset dari hasil realisasi belanja modal yaitu melalui sistem informasi manajemen daerah (Simda BMD). Untuk itu diperlukan analisis dan evaluasi terhadap penatausahaan aset tetap untuk mengetahui dan menilai kondisi apakah pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap di lingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku melalui aplikasi SIMDA BMD.

Hasil penelitian yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembukuan atau penatausahaan barang milik daerah secara umum telah sesuai dengan PSAP 07 yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2019 hanya saja pada pengelolaan aset tetap berupa tanah pada tahun anggaran 2019 belum memiliki sertifikat dan sebagian tanah belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan karena masih ditempati masyarakat. Kemudian berdasarkan analisis dan evaluasi dalam pelaksanaan Inventarisasi barang milik daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Permendagri No 19 Tahun 2016. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan SIMDA BMD aset tetap telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013. Namun dalam penggunaannya ditemukan beberapa kendala pada aplikasi SIMDA BMD yaitu tidak dapat terkoneksi ke aplikasi lain, hanya terkoneksi dengan sesama aplikasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan.

Kata kunci: **Analisis Penatausahaan Aset Tetap, Barang Milik Daerah, SIMDA BMD**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu instansi pemerintah, terdapat tiga paket undang-undang bidang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan yang dimiliki suatu instansi pemerintahan. Undang- Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dari beberapa penjelasan peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan barang milik negara adalah termasuk di dalam lingkup keuangan daerah. Lahirnya ketiga undang-undang tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi tentang pengelolaan barang milik daerah karena pertanggungjawaban penatausahaan barang milik daerah juga termasuk didalam lingkup keuangan negara. Terlebih lagi barang milik daerah

memiliki nilai yang mendukung pelaporan dalam neraca pemerintahan pusat, sehingga membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah.

Barang milik daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah. Barang milik negara tersebut sebagian besar diperoleh dari APBN yang merupakan uang rakyat sehingga pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan untuk meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan tujuan penatausahaan barang milik negara yaitu mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan barang milik negara, maka ketaatan pada peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan. Tujuannya, agar terwujud penatausahaan barang milik negara yang akuntabel dan transparan. Selain itu, pemerintah berkewajiban menyampaikan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dimana informasi barang milik negara yang terdapat dalam neraca yang terdiri dari pos persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang berasal dari Laporan Barang Milik Daerah ,ini dibuat berdasarkan data yang terdapat dalam invetarisasi barang dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

Aplikasi ini merupakan suatu bagian dari sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat mengelola aset daerah. Aplikasi ini juga sudah digunakan pada semua instansi pemerintahan. Data transaksi BMD adalah data yang berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMD,

yang dikirimkan melalui media Arsip Data Komputer setiap bulan oleh petugas operator SIMDA-BMD ditingkat satuan organisasi perangkat daerah.

Di dalam penerapannya pada organisasi perangkat daerah, masih ditemukan beberapa kelemahan,yang paling utama adalah belum dilaksanakannya ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya jumlah barang milik daerah juga menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi karena sulitnya penatausahaan barang milik daerah. Berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam penatausahaan barang milik daerah mengakibatkan banyaknya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pengelolaan akan barang milik daerah tersebut, sehingga pertanggungjawaban penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan sangat penting untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian ini objek penelitian pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Ikhtisar hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dinyatakan masih terdapat banyak pencatatan barang milik daerah yang belum efektif karena masih banyak aset milik daerah dalam penguasaan tidak sesuai peruntukkan dan lemahnya ketertiban aset di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penatausahaan aset tetap dan penerapannya terhadap sistem informasi manajemen daerah (SIMDA BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Selain itu kiranya penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran terutama dalam menganalisis efektivitas penatausahaan aset tetap dan penerapannya terhadap sistem informasi manajemen daerah (SIMDA BMD) di lingkungan organisasi perangkat daerah khususnya yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaatnya yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dengan mempelajari fakta dan realita di lapangan.

b. Bagi dunia akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi pembaca yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh tentang penatausahaan barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini,Susan.2014.*Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas.*(Online). http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertianefektivitas-dan-landasan.html. Diakses pada 3 Oktober 2018.

Anwar Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis.* Salemba Empat, Jakarta.

Darsono dan Anshari. 2013. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2007.*Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 12/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.* Jakarta: Kementerian Keuangan.

Mangkoesoebroto,Guritno.2001.*Ekonomi Publik.*.Edisi-III.Yogyakarta : BPFE.

Prof. DR. Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi/Cet 16. Jakarta: Alfabeta.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. Ak. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi/Cet 1. Yogyakarta : Andi Publishing.

Raharjo,Eko.2007.*Teori Agensi dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi*.Jurnal Akuntansi 2 (1),37-46.

Republik Indonesia.2003.*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia.2004.*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia.2004.*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia.2006.*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609.Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia.2010.*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.Jakarta: Sekretariat Negara.

V. Wiratna Sujarweni. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi.* Jakarta : Pustaka Baru Press.